PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GEDE RASBEN DANTES**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KERAJASAMA**
3. NHK : **525267**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 4.440.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1650 m2/72 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
7. Tanah Seluas 165 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/150 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 200.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. ----

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	391.820.494
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	5.031.820.494
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.031.820.494

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.